



Yang Tersingkap Dan Yang Tersungkup: Perang Padri Dan Implikasinya Terhadap Pakaian Keseharian Perempuan Minang-Muslim Pada Awal Abad XIX

Dedi Arsa

Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi

deddyarsya1987@gmail.com

Abstract: *This article discusses changes in the style and manner of dress for Minangkabau women from pre-Padri times to the emergence of modernity through the presence of Western colonialism. During that period, Minangkabau women's clothing has undergone a transformation in aspects of manner and style, the change follows social change: open and very simple in the period before Padri; tend to be stylish when the economy rises towards Padri; until very closed and simple at Padri's encouragement; post-Padri is a compromising period that is open to innovation but still based on the syar'iyah principle; while the West's presence gave new elements in the form of skirts and shirts, as well as hats. On the skin of the Minangkabau female body, there are layers of elements: local creations, puritan & modernist Islam at the same time, also the West*

Abstrak: *Artikel ini membahas perubahan corak dan cara berpakaian perempuan Minangkabau sejak masa pra-Padri hingga kemunculan modernitas lewat kehadiran kolonialisme Barat. Selama kurun itu, pakaian perempuan Minangkabau telah mengalami transformasi dalam aspek cara dan corak, perubahan itu mengikuti perubahan social: terbuka dan sangat sederhana pada periode sebelum Padri; cenderung penuh gaya ketika ekonomi menaik menjelang Padri; hingga sangat tertutup dan sederhana atas dorongan Padri; pasca-Padri adalah masa yang kompromistis yang terbuka untuk inovasi tetapi tetap mendasarkan pada prinsip syar'iyah; sementara*

kehadiran Barat memberi anasir-anasir baru berupa rok dan kemeja, juga topi. Di atas kulit tubuh perempuan Minangkabau, terdapat berlapis-lapis anasir: kreasi lokal, Islam puritan & modernis sekaligus, juga Barat.

Kata kunci: *Pakaian, Minangkabau, Padri, Perempuan.*

A. Pendahuluan

Sekarang kita begitu memperhatikan apa yang kita pakai. Pakaian telah mengusung banyak hal—kita telah sampai pada kesadaran yang demikian. Peristiwa-peristiwa belakangan ini telah menunjukkan bahwa itu benar. Pakaian telah lama juga disebut mengusung sebuah identitas yang kompleks. Mengingat itu orang-orang memandang pakaian mereka sebagai perluasan diri mereka. Sebagaimana kata pepatah, ‘kau dinilai dari apa yang kau pakai!’.

Pakaian merupakan ekspresi identitas seseorang. Elizabeth Wilson, sejarawan mode yang menulis hubungan antara pakaian dan modernitas, mengatakan bahwa pakaian dapat menampilkan "spirit of the age"—ia hadir sebagai penanda zaman atau suatu kurun. Pada konteks itu, pakaian hadir sebagai barometer budaya dan bentuk dari ekspresi sosial sekaligus. Kata Wilson lagi, ketika kita memakai pakaian, “we wear inscribed upon our bodies the often obscure relationship of art, personal psychology and the social order.”¹

Dalam bahasa Henk, sejarawan Barat yang menulis hubungan antara pakaian dan kekuasaan terutama di Jawa, pakaian adalah “kulit sosial dan budaya”. Ekspresi akan identitas individual dan sosial dalam sebuah puak-kultural dapat tecermin pada pakaian yang dikenakan oleh individu-individu pendukungnya. Henk juga mengatakan, “Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita menaruh harapan besar bahwa pakaian dapat menggambarkan dengan jelas identitas kita,” tulis Henk. Sementara pada struktur yang lebih tinggi, pada aspek politik atau kekuasaan, oleh karenanya, pakaian menjadi alat dalam membentuk dan mereproduksi sistem tanda kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dibawahinya. Dengan sistem tanda itulah kekuasaan dapat mengatur/mengontrol rakyatnya. Karena bagi keduanya, kekuasaan maupun masyarakatnya, pakaian

¹ Elizabeth Wilson. *Adorned in Dreams, Fashion and Modernity*. I B Tauris & Co Ltd, 1985, p. 247.

adalah juga alat identifikasi. Henk menulis bahwa baik negara maupun kelompok kepentingan menggunakan kode-kode berpakaian untuk menciptakan penampilan kuat dari kontrol negara dan kebangsaan.²

Di Minangkabau, pakaian telah merefleksikan masyarakat suatu zaman dengan sangat jelas. Kita bisa mengidentifikasi masyarakat zaman tertentu dengan memperhatikan pakaiannya—kain di atas kulit tubuhnya. Masyarakat paling kuno berkemungkinan besar tidak berpakaian sama sekali. Tetapi itu masa lalu yang jauh sekali. Tetapi pada masa kemudian, yang belum bisa dirumuskan sejarawan, orang-orang Minangkabau—sebagaimana masyarakat lain—kemudian mulai menggunakan penutup tubuh. Kain sendiri tidak punya riwayat yang tua di sini—kemampuan mengolah benang lebih belakangan, sekira dua atau tiga abad yang lalu. Mungkin pakaian dulu dibuat dari kulit-kulit kayu yang dipukul sehingga menjadi tipis dan halus dan nyaman untuk dikenakan. Sebab kain adalah produk impor dari kebudayaan yang lebih tua ‘peradabannya’, semisal Jawa dan Bugis (atau Makassar dalam sumber yang berbeda), atau lebih jauh Cina dan India—tempat di mana impor sutra dan *cotton* berasal.³ Sejauh yang tercatat, tidak muncul persoalan bersoal pakaian baik yang dipakai laki-laki maupun perempuan sepanjang periode yang telah dilalui. Hingga menjelang Padri atau selama masa Padri datang, pakaian lalu menjadi hal yang penting sekali. Sekira dimulai awal abad ke-19, pakaian menjadi hal yang harus mendapat pengaruh dari regulasi-regulasi penguasa (aturan-aturan agama), yaitu penguasa-penguasa Padri zaman itu. Kampung-kampung Minangkabau di bawah Padri mesti menerapkan aturan tertentu mengenai pakaian yang disesuaikan dengan aturan-aturan agama yang mereka percayai, terutama pakaian-pakaian yang berlaku di pusat dunia Islam di kawasan semenanjung Arab.⁴ Penelitian ini

² Henk Schulte Nordholt, “Negara di atas kulit: Pakaian, Sepatu dan Kerapian”, dalam *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, p. 139.

³ Khusus tentang pakaian Asia, lihat: Philip Steele, *A history of fashion and costume. Vol 2. The medieval world*, Bailey Publishing Associates Ltd 11a Woodlands 2005, p. 36-61. Hanya saja tidak dibicarakan sama sekali tentang kawasan di Asia Tenggara. Kawasan ini berada di bawah pengaruh Arab, India, dan Cina.

⁴ Untuk jenis-jenis pakaian perempuan muslim secara umum, secara ringkas lihat Clare Hibbert, *A history of fashion and costume. Vol 8. The Twentieth Century*,

menjadi menarik pada titik ini, oleh karena Padri sebagai sebuah gerakan telah memberi pengaruh yang luar biasa pada corak berpakaian orang-orang Minangkabau, secara khusus kepada perempuannya, dan bahkan pengaruh itu meninggalkan bekasnya yang pasti kemudian bahkan setelah pengaruh Padri berangsur-angsur memudar.

Dalam literatur tentang pakaian perempuan Minangkabau, terdapat perbedaan antara pakaian yang digunakan sehari-hari, pakaian untuk di luar rumah, dan pakaian formil untuk upacara adat.⁵ Penelitian ini akan fokus pada pakaian yang digunakan sehari-hari dan pakaian untuk di luar rumah. Pertanyaan pokoknya adalah bagaimana perkembangan pakaian pada peralihan abad ke-18 dan ke-19, sebuah periode yang penuh huru-hara dalam sejarah Minangkabau. Secara gamblang studi ini ingin melihat keberpengaruhan Padri atas pakaian perempuan Minangkabau dan kebertahanannya pengaruh itu kemudian setelah Padri disingkirkan dari medan laga sejarah. Dengan demikian studi ini tidak hanya berakhir pada masa Padri tetapi juga akan meneruskan pembacaan ke periode pasca-Padri - bahkan mungkin sedikit lebih jauh hingga kehadiran pengaruh modernitas yang dibawa Belanda ke pedalaman Minangkabau.

Dalam lapangan historiografi, pakaian menjadi bagian dari sejarah kebudayaan maupun seni, dan secara lebih spesifik lagi dimasukkan ke dalam sejarah mode. Perkembangannya dimulai di dunia Barat, sejak pertengahan abad ini (abad ke-20); diskursus tentang sejarah pakaian mulai bangkit setidak-tidaknya sejak 1965 (di Courtauld Institute of Art) dan sejak akhir 1970an terus berkembang hingga menunjukkan perkembangannya yang baik hingga dasawarsa

Bailey Publishing Associates Ltd 11a Woodlands 2005, p.57. Di sana dikatakan ada tiga corak 'muslim dress': chador, burka, hijab, jilbab. Chador, atau cadar, adalah jubah hitam yang menutupi seluruh kepala, hanya tersisa celah kecil untuk mata. Burka serupa dengan chadar, hanya saja celah mata biasanya dipenuhi jaring bersulam (net). Muslim lainnya wanita mengenakan jilbab, kain penutup kepala (a headscarf). Hijab dan jilbab pada dasarnya sama, kain panjang yang menutupi tubuh bagian atas tetapi wajah. Kaum Padri, tampaknya, cenderung mempopulerkan model dua yang pertama.

⁵ Puti Reno Raudha Thaib, *Pakaian Adat Perempuan Minangkabau*, Padang: Penerbit Bundo Kandung, 2014.

ini.⁶ Para sejarawan budaya telah memproduksi karya-karya tentang perubahan gaya berpakaian dan subjek tersebut telah mendapat respek yang luas di kalangan intelektual. Riset-riset tentang ini berdasarkan pada studi atas lukisan/ilustrasi, karya-karya fotografi, plate (gambar dalam buku), dan literatur-literatur tertulis.⁷

Sementara di Indonesia, tampaknya sejarah mode baru mulai dirintis. Sejarah mode dalam ranah historiografi baru belakangan ini saja menjadi pembicaraan dan menjadi topik riset segelintir sejawaran/peneliti Indonesia. Buku-buku tandon metodologi sejarah yang ditulis para sejarawan Indonesia, misalnya, tidak memasukkan sejarah mode sebagai sebuah kemungkinan yang terbuka untuk diteliti. Karya-karya tentang metode dan metodologi sejarah dari sejarawan Kontowijoyo, Sartono Kartodirdjo, Helius Sjamsuddin, Dudung Abdurrahman, yang secara luas dijadikan buku pegangan di kampus-kampus sejarah, misalnya, tidak memuat sejarah mode secara khusus. tampak alpa terkait topik ini. Untuk sejarah Indonesia, sejarawan-sejarawan Barat jugalah yang dianggap merintisnya. Henk, terutama, telah cukup baik menulis tentang ini. Artikelnya, “Negara di atas Kulit: Pakaian, Sepatu, dan Kerapian” telah memberi kita banyak konsep-konsep yang berharga tentang sejarah mode.⁸ *Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia*, yang dieditori Henk, memuat cukup banyak artikel yang bagus-bagus sebagai model-model pengelaborasi atas topik ini.⁹ Artikel Rudolf Mrazek tentang pakaian-pakaian para aktivis pergerakan di zaman kesadaran nasional termaktub dalam bukunya, *Engineers of Happy Land*, satu bab khusus tentang “Pesolek Indonesia”.¹⁰ Masih soal

⁶ Nilay Kayaalp, "Fashion in Venice: An Expression of Modernity", *YTÜ Arch. Fac. E-Journal*, Volume 3, Issue 2, 2008, (p.124-136)

⁷ Catherine L. Howey, "Dressing a Virgin Queen: Court Women, Dress, and Fashioning the Image of England's Queen Elizabeth I, *Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal*, 2009, Vol. 4, p.201-2018.

⁸ Henk Schulte Nordholt, “Negara di atas kulit: Pakaian, Sepatu dan Kerapian”, dalam Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

⁹ Di dalam buku yang dieditori Henk di atas itu di antaranya termaktub karya Kees van Dijk berjudul “Sarong, Jubba, dan Trousers. Appearance as a Means of Distribution and Discrimination”; J.G. Taylor, “Costume and Gender in Colonial Jawa”. Henk Schulte Nordholt (editor), *Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia*, KITLV Press, 1997.

¹⁰ Rudolf Mrazek, *Engineers of Happy Land Technology and Nationalism in a Colony*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

sejarah mode di Jawa, karya Dwi Ratna Nurhajarini, “Kain Kebaya dan Rok. Pakaian Perempuan Yogyakarta Awal Abad ke-20” mungkin patut juga disebutkan di sini.¹¹ Pengikut Mazhab Annales, penganut teori sejarah total, merasa perlu memasukkan pembahasan mengenai pakaian—contoh yang terbaik untuk sejarah Indonesia adalah karya Deny Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya* yang tiga jilid itu dan karyanya *Sejarah Aceh Zaman Iskandar Muda* lebih banyak lagi melihat aspek pakaian yang dikenakan orang-orang Aceh termasuk kalangan perempuan.¹² Karya monumental Djoko Sukiman, *Kebudayaan Indis*, juga memperlihatkan persilangan kebudayaan di Jawa, termasuk yang disinggung adalah dalam aspek pakaian.¹³

Belakangan, penelitian-penelitian tentang sejarah mode mulai banyak diminati di jurusan-jurusan sejarah di antaranya karya Sri Bakti Yulitasari “Pengaruh Eropa Terhadap Gaya Berpakaian Bumiputra di Yogyakarta (1900-1942)”¹⁴ dan karya Elif Rahmayanti, “Pengaruh Eropa Terhadap Perkembangan Mode Busana Harian Wanita di Jawa 1870-1942”.¹⁵ Selain sedikit sekali ditemukan jurnal atau berkala ilmiah yang memuat artikel tentang topik ini, di antaranya, artikel yang ditulis Ayu Septiani,¹⁶ Saya sendiri telah pula menelaah sebuah zaman dalam perspektif sejarah model begini dalam artikel sederhana berjudul “Cerita Pendek dan Celana Pendek”.¹⁷

Karya-karya historiografi yang telah dibebaskan di atas terutama berkisah tentang Jawa. Untuk kajian di luar Jawa, maksud

¹¹ Dwi Ratna Nurhajarini, “Kain Kebaya dan Rok. Pakaian Perempuan Yogyakarta Awal Abad ke-20”, Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2015.

¹² Deny Lombard, *Kerajaan Aceh. Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.

¹³ Djoko Sukiman, *Kebudayaan Indis. Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi Penulis*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

¹⁴ Sri Bakti Yulitasari “Pengaruh Eropa Terhadap Gaya Berpakaian Bumiputra di Yogyakarta (1900-1942)” Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2016.

¹⁵ Elif Rahmayanti, “Pengaruh Eropa Terhadap Perkembangan Mode Busana Harian Wanita di Jawa 1870-1942”.

¹⁶ Ayu Septiani, “Perubahan Gaya Pakaian Perempuan Bangsaawan Pribumi di Jawa Tahun 1900-1942” *Jurnal Candrasangkala*, Vol 1, No 1, November 2015.

¹⁷ Deddy Arsyah, “Cerita Pendek dan Celana Pendek”, *Padang Ekspres*, 12 Juli 2017.

saja Melayu, ada karya Nazirah Lee,¹⁸ yang membahas transformasi pakaian muslim di Semenanjung Melayu. Namun, kajian untuk Melayu-Minangkabau, karya yang paling bagus membahas mengenai ini sulit dicari. Beberapa yang perlu disebutkan di sini adalah karya-karya yang meninjaunya sekilas, dan tidak membicarakannya dengan lebih lengkap untuk memenuhi keingintahuan kita atas topik ini dalam perspektif historis. Ada buku karya Puti Reno Raudha Thaib¹⁹ dan *Pakaian Adat Tradisional Daerah Sumatra Barat* susunan Ibrahim Anwar dkk.,²⁰ tetapi karya-karya tersebut tampak tidak begitu mepedulikan aspek historis, dan pula hanya membahas pakaian formil-adat, sementara yang sedang kita susun ini adalah pakaian perempuan di keseharian dengan perspektif yang sangat diakronik. Perlu juga disebutkan di sini adalah karya Selfi Mahat Putri, sekalipun memokuskan pada hal perkawinan perempuan Minangkabau, tapi dalam beberapa hal juga menyinggung keterpengaruhannya oleh sebab gejala modernitas. Karya yang disebutkan terakhir ini sedikit lebih baik menawarkan gambaran terkait perkembangan pakaian keseharian perempuan Minangkabau dari perspektif historis dengan melihat keterpengaruhannya atas modernitas. Sementara yang paling dekat dengan topik ini adalah sebuah artikel yang ditulis Fadli Lukman.²¹ Artikel ini melihat perkembangan penutup kepala perempuan di Sumatera Barat dan apa yang melatarbelakangi perubahan itu. Batasan artikel itu adalah semenjak abad ke-20. Tulisan ini ada sedikit menyinggung pakaian perempuan kuno—maksudnya tentu sebelum Padri, tetapi hanya disinggung seintas lalu, sebab diakui penulisnya, narasi tentang itu sulit sekali didapatkan. Tulisan saya ini sendiri bermaksud memecahkan keterbatasan tersebut dengan melirik sumber-sumber yang lebih beragam.

Tulisan ini merupakan studi sejarah dengan spesifikasi tematik sejarah mode (*fashion*), menelaah perkembangan model

¹⁸ "Muslim Dress Fashion Transformation In Malay Peninsula, 1930-1940". *Jurnal Perspektif*, Jil. 6 Bil. 3. 2014. p. 68-80.

¹⁹ Puti Reno Raudha Thaib, *Pakaian Adat Perempuan Minangkabau*, Padang: Penerbit Bundo Kandung, 2014.

²⁰ Ibrahim Anwar dkk., *Pakaian Adat Tradisional Daerah Sumatra Barat*, Jakarta: Depdikbud & Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985.

²¹ Fadli Lukman, "Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala Muslimah di Sumatera Barat", *Musâwa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014.

pakaian sebagai refelksi atasi kehidupan sosial dan politik. Sejarah mode atau sejarah pakaian ini bisa jadi dimasukkan ke dalam sejarah budaya (*culture*) maupun seni (*art*). Meskipun seharusnya menjadi cabang tersendiri sebagaimana sejarah kota, sejarah gender, dan yang sejenis dengan itu. Oleh karena itu para ahli sejarah membuat kategori khusus sejarah mode. Tulisan ini disusun melalui empat tahap, yaitu: *heuristik* berupa pengumpulan bahan/sumber, *kritik* sumber berupa kritik intern-ekstern, *interpretasi*, dan *ekplanasi* dalam bentuk historiografi.²²

Tulisan ini berusaha melacak sumber-sumber tua yang tersedia dan dapat dilacak. Pertama-tama akan melacak kaba-kaba klasik Minangkabau.²³ Pengkategorian *kaba* klasik dan *kaba* modern dalam tulisan ini berdasarkan pada kategori Edward Djamaris. Menurutnya, *kaba* klasik adalah *kaba* yang dikabarkan sebelum kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau, banyak bercerita tentang kehidupan raja-raja dengan *setting* negeri yang tidak terpetakan secara geografis, dengan narasi yang sulit dilacak secara historis. Sementara *kaba* modern adalah *kaba* yang lahir dalam masa pemerintah Hindia Belanda, seringkali *kaba* ini ditulis berdasarkan kisah nyata, dengan alur narasi, *setting*, dan penokohan yang memang sungguh-sungguh ada dalam kenyataan sejarah. Seberapa bisa kaba-kaba yang merupakan karya sastra ini dipakai untuk menggambarkan masa lalu, memang debatis juga sifatnya. *Kaba* adalah karya fiksi dalam konsepsi modern. Kebenaran yang dikandungnya adalah kebenaran-fiksi. Adalah anakronistik jika kemudian dinilai peristiwa dalam *kaba* sebagai kebenaran yang faktual—kebenaran sejarah. Meskipun begitu, ahli-ahli sejarah modern, telah mengkategorikan *kaba*—sebagaimana karya sastra lainnya—sebagai fakta mentalitas yang dapat dipakai untuk melihat bagaimana mentalitas masyarakat yang tengah dikabarkannya. Jika kita perpegang pada pandangan *new-historicism*, maka kaba-kaba tersebut nisacaya dapat digunakan, mengingat dalam pandangan ini fakta dan fiksi tidak terpisahkan,

²² Christopher Lloyd. *The Structure of History*. Cambridge. Blackwell. 1993; Gilbert J. Garaghan. *A Guide to Historical Method*. Fordham University Press New York. 1984; Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana. 2003; Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia. 1993.

²³ Edward Djamaris, *Kaba Minangkabau* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2004), hlm.54; lihat juga Umar Junus, *Kaba dan sistem sosial Minangkabau: Sebuah problema sosiologi sastra*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

sastra dan sejarah telah lesap batas; pandangan ini tidak memisahkan karya sastra dengan zamannya. Seperti yang dikatakan salah seorang penganjurnya, Louis A. Montrose, “membaca sastra sama dengan membaca sejarah, membaca sejarah sama dengan membaca sastra”.²⁴

Yang tidak kalah penting dari semua itu, adalah beberapa autobiografi dari abad ke-19 yang ditulis dari kalangan bumiputra. Untuk sementara ini, saya telah melihat kitab yang tersedia yang bersumber dari abad yang kita bicarakan: Faqih Shaqhir dan Tuanku Imam. Informasi dalam kitab-kitab ini tidak begitu berarti, dan dapat dikatakan tidak monolog. Kitab-kitab yang lebih tua yang ditulis para naturalis, pelancong, maupun etnolog tentang Sumatra, semisal William Marsden dan De Stuers justru lebih informatif. Untuk yang pertama, memang diakui kita tidak menemukan gambaran apa pun terkait topik. Untuk yang kedua, hanya ada sedikit penjelasan, tetapi itu akan sangat berarti.

Sumber yang paling berarti barangkali adalah ilustrasi-ilustrasi (sebelum akhir abad ke-19) dan foto-foto (ketika teknologi fotografi mulai ditemukan). Rata-rata, baik ilustrasi maupun foto dibuat oleh orang Barat dari perspektif mereka.²⁵ Memang aneh juga, kenapa sumber jenis ini jarang dipakai para sejarawan, padahal beberapa ilustrasi dan foto sangat informatif. Henk juga merasa heran. “Mengherankan sekali, betapa jarangnyanya, betapa jarangnyanya koleksi-koleksi besar foto-foto Belanda zaman kolonial digunakan sebagai bahan sumber, dan lebih penting lagi, sebagai objek analisis.” Walaupun buku-buku sejarah dihiasi dengan banyak foto, tetapi seringkali foto-foto hanya menjadi pelengkap saja dari narasi, bukan sumber narasi itu sendiri atau—sebagaimana kata Henk—sebagai “objek analisis”.²⁶ Oleh karena itu, tulisan ini menampilkan banyak foto yang bersumber dari laman kitlv dan dari beberapa buku.

²⁴ Melani Budianta. “Budaya, Sejarah & Pasar: New Historisisme dalam Perkembangan Kritik Sastra”, *Jurnal Susastra*, Vol 2, No 3, Tahun 2006.

²⁵ Achmad Sunjayadi, "Mengabadikan estetika. Fotografi dalam promosi pariwisata kolonial di Hindia-Belanda", *Wacana*, Vol. 10 No. 2, Oktober 2008 (p.201-316); Jugiarie Soegiarto, "Wacana kolonial dalam film *Moeder Dao*, de schildpadgelijkende", *Wacana*, Vol. 10 No.2, Oktober 2018 (p.317-347)

²⁶ Henk Schulte Nordholt, “Negara di atas kulit: Pakaian, Sepatu dan Kerapian”, dalam *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, p. 140.

B. Perempuan Di Tengah Masyarakat Yang Berubah

Pada akhir abad ke-18 hingga dua dekada awal abad ke-19 adalah masa-masa penuh huru-hara dalam sejarah masyarakat Minangkabau. Pada akhir abad ke-18 itu, ekonomi masyarakat pedalaman Minangkabau itu tengah mendapat ransangan yang lebih baik lagi, akibat dari perdagangan kopi dan akasia—komoditas-komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia ketika itu. Orang-orang Minangkabau dengan itu mengalami peningkatan kesejahteraan yang drastis. Orang-orang kaya baru bermunculan di tengah-tengah masyarakat pedalaman akibat lalu lintas produksi pertanian yang menggeliat. Akan tetapi, dalam kemajuan ekonomi yang meningkat cukup drastis itu, terdapat implikasi lain yang hampir tidak diduga sebelumnya oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri: kehidupan moral mengalami degradasi yang hebat. Seiring dengan lalu-lintas uang yang cepat, mabuk-mabukan dan madat merebak dan gelandangan judi bermunculan di pasar-pasar pedalaman Minangkabau. Uang yang didapat segera dihamburkan di gelandangan-gelandangan adu ayam atau di kedai-kedai tuak dan madat.²⁷ Candu dan madat mengobarkan nafsu dan meruntuhkan pendirian para pemakainya. Nafsu ini dengan mudah meletus menjadi perkelahian, perampokan, dan bahkan pembunuhan. “Mengadu ayam dan mengisap candu yang digemari oleh Orang Melayu menyebabkan mereka menjadi pencuri dan pembunuh”, kata J. C. Boelhouwer, seorang letnan Belanda yang pernah ditugaskan di Pariaman pada dua dasawarsa awal abad ke-19.²⁸ Para penghulu dianggap sudah tidak mampu mengembalikan ketentraman negeri akibat munculnya kelompok-kelompok penyamun ini. Kegemaran menghisap candu tidak saja dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi juga oleh elite adat sendiri. Elite adat dianggap tidak dapat lagi diandalkan karena bahkan tidak jarang beberapa elit adat sendiri juga terlibat dalam praktik kejahatan, seperti melindungi kelompok-kelompok samun. Bahkan,

²⁷ Syafnir Aboe Nain, *TuanKu Imam Bonjol: Sejarah Intelektual Islam di Minangkabau, 1784-1832* (Padang: Esa, tt.); Dawis Datoek Madjolelo & Ahmad Marzoeki, *TuanKu Imam Bondjol: Perintis Djalan ke Kemerdekaan* (Djakarta: Penerbit Jembatan, 1951), p. 37-38; hlm. 33-34; Dobbin, p. 207.

²⁸ J. C. Boelhouwer, *Kenang-kenangan di Sumatera Barat Selama tahun-tahun 1831-1834* (Padang: Lembaga Kajian Gerakan Padri, 2009), p. 33; Dobbin, p. 207

menurut Dobbin, atas perlindungan mereka, memungkinkan terdapat beberapa kampung penyamun di dataran tinggi Minangkabau.²⁹

Di saat-saat kemerosotan peran penghulu seperti itulah beberapa ulama Padri muncul menggantikan peran mereka dalam menyelesaikan persoalan kejahatan di nagari-nagari dataran tinggi Minangkabau. Gerakan Padri ditujukan pertama-tama kepada kebiasaan yang merusak dalam masyarakat Minangkabau seperti kegembiraan berjudi dan mengisap candu yang telah menstimulasi berkembang pesatnya kejahatan.³⁰ Mulanya, pembersihan terhadap praktik ini dimotori Tuanku nan Tuo, seorang guru dan pendiri sebuah surau di Koto Tuo, Ampek Angkek, Agam.³¹ Muridnya banyak, di antara mereka yang terkenal adalah Tuanku nan Renceh, Sjekh Jalaluddin Faqih Shaqir, Haji Miskin, Tuanku Lintau, Tuanku Kapau, dan Peto Syarif yang kelak menjadi Tuanku Imam Bonjol.³² Di tangan Tuanku nan Tuo, upaya untuk turut serta dalam menyelesaikan persoalan kejahatan di nagari-nagari Minangkabau masih dengan jalan yang moderat. Tuanku nan Tuo bersama murid-murid perguruannya ‘membersihkan’ pasar-pasar yang mereka kuasai dari candu, madat, maupun gelanggang judi. Mereka menjadi ‘dubalang’ bagi pemberantasan kejahatan di pasar-pasar itu. Banyak dari para pedagang yang kemudian senang dengan pasar-pasar di bawah kendali perguruan Tuanku nan Tuo. Di bawah kendali Tuanku nan Tuo dan perguruannya, para pedagang hampir-hampir tidak perlu merasa khawatir karavan-karavan mereka akan dirampok/disamun. Jika pun terjadi kejahatan maka “akan mendapat hukuman yang semestinya sesuai hukum agama”.³³

Memasuki awal abad ke-19, upaya memberantas praktik kejahatan ini kemudian diradikalkan terutama oleh kedatangan tiga orang haji yang [dianggap terpengaruh aliran Wahabiyah] baru

²⁹ Dobbin. p. 141-142

³⁰ B. J. O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi* (Jakarta: Bharata, 1973), p.12-13; Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), p.85

³¹ Syahnir Aboe Nain, *Faqih Shagir* (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004), p.14; Irhash A. Shamad dan Danil M Chaniago, *Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: Tintamas, 2007), p.63-66

³² Taufik Abdullah (ed-), *Sejarah Lokal di Indonesia* (Jogjakarta: UGM Press, 1996), p. 156-157

³³ Syahnir Aboe Nain, p. 16

kembali dari tanah Mekah. Mereka melihat perkembangan kejahatan di tanah airnya sendiri dengan pandangan yang lebih keras dari sebelumnya dan lebih keras dari pandangan ulama pendahulunya. Merebaknya kejahatan di nagari-nagari Minangkabau mereka anggap sebagai tanda-tanda kehancuran zaman yang harus segera dicegah. Mereka mengira masyarakat tengah berada di ambang kehancuran, umat tengah sakit parah dalam kekafiran yang akut, untuk itu mesti diselamatkan sesegera mungkin ke jalan kebenaran. Mereka dengan segera menerapkan hukum Islam di pasar-pasar yang mereka kuasai, dan bahkan tidak jarang bertindak lebih jauh dengan membumi-hanguskan kampung-kampung yang mereka anggap sebagai kampung penyamun.³⁴

Turun-tangannya kaum Padri dalam memberantas kejahatan dengan gerakan yang lebih radikal otomatis semakin menimbulkan kerenggangan hubungan dengan elite adat yang sebelumnya juga telah terjadi sekalipun dalam suasana yang dingin. Pamor politik para penghulu semakin direbut oleh ulama-ulama Padri ini, bersebab tugas mengamankan pasar dan nagari itu sesungguhnya merupakan tugas dasar penghulu/elite adat. Digantikannya peran itu sekarang oleh perguruan-perguruan tuanku-tuanku Padri memungkinkan memunculkan ketegangan di antara keduanya, yang semakin menggiring keduanya pada perseteruan fisik. Gerakan Padri yang berlangsung selama dua dasawarsa awal abad ke-19, dalam konteks ini, dapat dilihat di antaranya sebagai upaya perebutan pamor di antara para penghulu sebagai elit adat dan di sisi lain tokoh-tokoh Padri dalam agendanya mengamankan negeri dari kejahatan.³⁵ Kedua belah pihak kemudian saling berebut pamor, saling menciptakan pengaruh di nagari-nagari dataran tinggi, dan tidak jarang kemudian hingga berujung pada pertumpahan darah dan perang terbuka yang mengantarkan dataran tinggi Minangkabau ini ke perang sipil terpanjang dalam sejarah negeri ini.

Lalu bagaimana sejarah perempuan di tengah pusaran konflik itu? Secara normatif-adat, sistem matrilineal selalu dibanggakan sebagai sistem kekerabatan yang menempatkan perempuan pada posisi yang penting dalam keluarga, yaitu sebagai penerus garis keturunan sekaligus penjamin eksistensi dan kontinuitas sebuah

³⁴ Dobbin, p. 209; Syafnir Aboe Nain, p. 17

³⁵ Syafnir, *Faqih Shaqhir...* p. 10 & 12

keluarga Minangkabau. Taufik Abdullah dalam “Some Notes on the Kaba Tjindua Mato: an Example of Minangkabau Traditional Literature” menguraikan bagaimana kedudukan perempuan dalam kebudayaan Minangkabau.³⁶ Secara normatif pula, adat Minangkabau memang menempatkan perempuan dalam kedudukan yang sangat terhormat. Hal ini tidak jarang menimbulkan sikap heran para peneliti. “Kasus Minangkabau selalu mengganggu asumsi-asumsi universalistik atas kedudukan perempuan di dunia,” tulis Hedler mengutip karya Evelyn Blackwood, *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village*. Ini disebabkan karena kenyataan bahwa budaya Minangkabau disebut matrifokal: walaupun laki-laki bisa menjadi bagian dari kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka, yang menjadi jangkar keluarga adalah ibu.³⁷

Narasi-narasi semacam ini, jika diteruskan, bisa panjang menjela-jela. Tetapi, jika kita uangkai sejarah lebih jauh ke belakang, maka sejarah perempuan pada kurun sebelum abad ke-20 nyaris belum terungkap dengan memadai (untuk tidak menyebut tidak ada sama sekali). Meskipun mereka ditempatkan pada posisi yang terhormat dalam adat normatif (sebagaimana dalam kitab-kitab adat pada umumnya), tetapi peran mereka sama sekali tidak tercatat dengan lebih meyakinkan dalam sejarah dengan pendekatan apa pun yang pernah ditulis tentang masyarakat di tengah Pulau Perca ini, termasuk pada masa peralihan abad 18 & 19 yang tengah kita bicarakan ini. Perempuan-perempuan sedikit sekali dicatat, jika pun dicatat posisinya tak lebih dari objek-terlaku bukan sebagai subjek-pelaku. Narasi-narasi yang telah dibicarakan secara normatif di atas terpental dengan mudah oleh kehadiran fakta-fakta dalam realitas historis abad tersebut yang penuh konflik.

Untuk membicarakan perempuan Minangkabau di tengah konflik pada periode itu ada baiknya kita mengutip dua buku berikut ini. Yang pertama adalah Naskah Faqih Shaqhir atau disebut juga

³⁶ Taufik Abdullah, “Some Notes on the Kaba Tjindua Mato: an Example of Minangkabau Traditional Literature”, *Indonesia*, Volume 9 (April 1970), h. 1-22; Selfi Mahat Putri, “Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2015.

³⁷ Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam dan Kolonialisme di Minangkabau* (Jakarta: Freedom Institute, 2010), p. 9.

Hikayat Syekh Jalaluddin, sebuah kitab dari awal abad ke-19.³⁸ Naskah ini adalah catat dari sumber pertama yang terlibat langsung dalam pusaran konflik pada peralihan abad tersebut. Dalam naskah itu, Jalaluddin menerangkan tentang perang-perang yang dilakukan Padri, sejak Tuanku nan Renceh yang kemudian membentuk aliansi Harimau nan Salapan, atau Tuanku nan Salapan dalam bahasa Jalaluddin. Kampung-kampung yang tidak menerapkan dan tunduk kepada prinsip-prinsip Padri diserang dan dibakar. Laki-lakinya diperangi dan dibunuh, sementara perempuannya yang tak dapat melarikan diri dijadikan tawanan Padri. Perempuan-perempuan itu “setengahnya dijualnya dan bagi setengahnya dipergundiknya.” Di bahwa Renceh dan aliansinya, Padri menerapkan sikap-sikap yang keras. Jalaluddin menerangkan banyak aspek, seperti siar-bakar, pengkifiran, tetapi kita hanya akan membicarakan soal yang terjadi dan menimpa perempuan saja. Tentang itu Jalaluddin menuliskan, “Sangatlah karas pekerjaan Tuanku nan Salapan.” Tuanku-tuanku Padri itu telah “menggambil dan merampas perempuan yang bersuami dan menikahkan perempuan yang tidak sekopo [sekaum] dengan tidak redhanya dan menawan orang dan berjual dia dan bepergundik tawanan”

Naskah lain, Naskah Tuanku Imam Bonjol, pada beberapa sisi mengamini apa yang dinarasikan Jalaluddin di atas. Isinya nyaris penuh oleh narasi tentang perang-perang yang dilakukan oleh Padri, dalam usaha mereka untuk mendirikan “agama Allah dan agama rasulullah” dan menciptakan sebuah masyarakat yang “memegang hukum kitabullah.” Tahun-tahun penuh dengan pertikaian antarkampung; usaha suatu kampung Padri yang kuat menaklukkan kampung-kampung lain yang lebih lemah, menjadikannya sebagai daerah taklukkan yang tunduk secara politik dan ekonomi kepada Padri. Tiap kampung yang ditaklukkan Padri, di sana “ditanamlah imam khatib dengan khadi pada segala tempat tumbuh” sehingga dapat di sana “terpakailah hukum syarak.” Di tengah kecamuk itu, bagaimana perempuan?

Sebagaimana yang dicatat Jalaluddin juga, dalam berbagai penyerbuan Padri atas kampung-kampung, tidak disebutkan tentang kehadiran perempuan sebagai pasukan perang. Dalam penyerbuan

³⁸ Faqih Shaqhir, p.17

atas suatu kampung, laki-laki dapat melarikan diri jika kalah berperang, tetapi perempuan tetap tinggal tanpa tahu akan melarikan diri ke mana. “Tinggal perempuan saja lagi dan tidak tentu larinya,” catat Tuanku Imam. Mereka akan menjadi tawanan para penyerbu. Perempuan sebagai tawanan akan dibawa ke pusat-pusat Padri di lembah Alahan Panjang. Penyerbuan ke Pandam Gadang, misalnya, disebutkan Tuanku Imam, “Perempuan ada terbawa sapa dua ke Bonjol.” Tidak dijelaskan bagaimana nasib ‘sapa dua’ yang lain, juga tidak kita tahu kenapa hanya setengahnya yang dibawa? Mungkin saja jaraknya yang jauh, atau bisa juga karena Bonjol sendiri sudah penuh dengan tawanan perempuan, sebab bahkan, perempuan kelas atas juga diperlakukan sebagai tawanan ketika kampungnya dikalahkan, “tertawallah putri di Rokan oleh Tuanku Mudo.” Tuanku Imam mencatat: “... mana-mana yang tidak tunduk perempuannya dibawa semuanya ke Bonjol.”

Kita tidak tahu, sudah berapa tawanan perempuan yang ada di Bonjol, sebab perang-perang yang dilakukan Padri banyak sekali, dan setiap perang-perang itu kita tahu dari naskah itu membawa perempuan serta sebagai tawanan ketika pulang. Sungguh amat sulit untuk membuktikan jumlahnya dengan angka-angka. Mereka yang ditawan itu dijadikan budak untuk dijual kembali di pasar-pasar budak atau bahkan ‘gundik’—dalam bahasa Jalaluddin begitu. Kita bisa membayangkan-bayangkan jumlahnya dengan melihat pada diri Tuanku Imam sendiri sebagai pemimpin utama Bonjol. Berapa istri tuanku Imam pada masa-masa ‘penaklukkan’ ini? Dalam naskahnya sendiri dicatat, bahwa pada usianya yang ke-60 tahun, setelah terdesak oleh serangan Belanda, Tuanku Imam menyingkir dan bergerilya ke hutan-hutan dengan membawa keluarganya dan diikuti oleh penyikut-penyikutnya kemudian. Dalam naskahnya tertulis: “Dan kemudian berangkatlah beliau Tuanku Imam serta *anak bini beliau serta dengan perempuan anak-anak* beliau dengan berhibah-hiba saja. Adalah *sembilan puluh orang* dan lain dari pada itu ada juga orang yang menurutkan beliau. Dan ada 300 manusia adanya gadang kecil, tua dan muda.” (p.50). Jadi, anggota keluarga Tuanku Imam saja berjumlah 90 orang, terdiri dari istri-istri, anak-anaknya, dan perempuan anak-anaknya—yang terakhir ini tentulah maksudnya menantu-menantu perempuannya. Sulit sekali untuk menjelaskan ini lebih jauh, kita bisa saja mengatakan bahwa anak-anaknya dan mungkin juga Tuanku Imam sendiri memiliki cukup banyak istri,

yang terlalu gegabah untuk dengan segera menyebutnya gundik, karena memang tidak kita dapat keterangan lain yang dapat mendukung hal tersebut. Tetapi kalau kita bandingkan dengan catatan Jalaluddin, tentu saja ada kemungkinan ke arah itu, karena Jalaluddin mencatat tentang kebiasaan orang Padri untuk mempergundik tawanan perempuan. Tetapi saat ini, kita tentu saja harus sangat berhati-hati mengambil kesimpulan-kesimpulan.

Kita tidak membicarakan naskah lain, semisal yang ditulis dari sudut pandang kolonial oleh orang Eropa misalnya, tetapi yang kita bicarakan ini adalah karya-karya pribumi yang terlibat—lagi pula ditulis dari sudut pandang pribumi. Sekalipun akan tumbul juga kesangsian bahwa naskah itu telah mengalami suatu proses, yang dalam proses itu telah memberi keraguan-keraguan akan ikut campurnya pihak lain dalam penyusunannya. Naskah Faqih Saghir Jalaluddin, misalnya, ditemukan di Belanda. Begitupun Naskah Tuanku Imam, dilanjutkan penulisannya oleh anaknya, yang telah menjadi pegawai kesayangan Belanda ketika dia menuliskan ulang naskah ayahnya itu. Tetapi tulisan ini belum akan sampai menjangkau sejauh itu. Mungkin permasalahan ini dapat menjadi permasalahan tersendiri untuk kaji dalam artikel lain. Sebab pasal ini telah sampai pada tujuannya semula, hendak menggambarkan perempuan-perempuan Minangkabau di tengah pusaran prahara zaman Padri itu.

C. Pengaruh Padri Terhadap Pakaian Perempuan Minangkabau

Tiap kampung yang ditaklukkan Padri, di sana “ditanamlah imam khatib dengan khadi pada segala tempat tumbuh” sehingga dapat di sana “terpakailah hukum syarak.” Begitulah yang dicatat Tuanku Imam dalam otobiografinya. Tetapi kita tidak sekalimat pun memperoleh gambaran tentang gambaran masyarakat yang telah tersyarakkan itu? Terutama yang hendak kita ketahui adalah soal perempuan. Apakah dalam hukum syarak ala Padri, perempuan dapat terlibat dalam ruang publik sebagaimana perempuan Minangkabau umumnya dalam gambaran adat? Ini terkait juga dengan pertanyaan pokok kita dalam tulisan ini: bagaimana persisnya Padri telah membentuk atau mempengaruhi apa yang ada di atas kulit tubuh perempuan—lebih tepatnya pakaian? Namun, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu tentu kita harus tahu gambaran

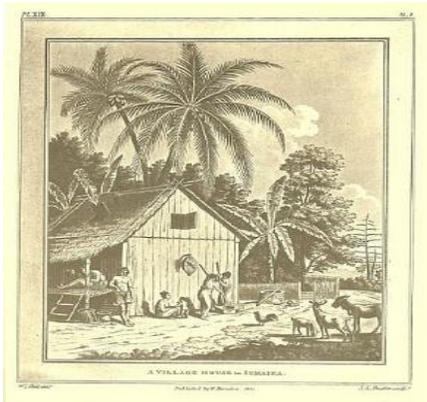
pakaian perempuan Minangkabau sebelum gerakan Padri menjadi gejala yang menguat di dataran tinggi.

Dada yang Tersumbul dan Rambut yang Disanggul

Bagaimana pakaian masyarakat Minangkabau sebelum pengaruh Padri? Ada sebuah ilustrasi dalam *Reizend Door Oost-Indie*, yang menggambarkan pemandangan dataran tinggi Minangkabau pada periode awal; dalam ilustrasi itu terdapat seorang laki-laki dan seorang perempuan Minangkabau dengan latar sebuah rumah gadang. Perempuan ditampilkan dengan bawahan kain bermotif batik, sementara atasannya kain tipis dengan dada rendah tanpa lengan. Ilustrasi dalam *De Stuers* juga menggambarkan perempuan dengan tampilan yang nyaris mirip (lihat Gambar 4). Gambar-gambar itu menampilkan perempuan dengan kain penutup dada tetapi rendah, yang menampakkan hampir setengah bagian payudara bagian atas dan juga bagian samping. Ilustrasi-ilustrasi tersebut dibuat oleh ilustrator Barat dan dari sudut pandang Barat. Lukisan-lukisan aliran romantik sudah diketahui suka menampilkan perempuan-perempuan dari dunia Timur dengan pandangan yang eksotis, yang dalam aliran seni rupa disebut *mooi indie*—Hindia yang molek. Penonjolan-penonjolan tubuh—terutama perempuan—dilakukan untuk menambah sisi dramatik akan eksotika dunia Timur. Untuk itu, kita perlu melacak lebih jauh ke sumber-sumber lain sebagai narasi penjelasnya.

Gambar 1 & 2.

Kehidupan perkampungan di Sumatra, tidak dijelaskan secara persis Sumatra bagian mana, kemungkinan besar di wilayah Tenggara



Sumber: William Marsden, *History of Sumatra*)



Gambar. 3

Pemandangan di perkampungan
Minangkabau

(Sumber: B.E.A., Brommer,
Reizend Door Oost-Indie).

Di masa yang lebih awal, mungkin saja perempuan Minangkabau berpakaian seperti masyarakat Jawa dan Bali berpakaian; menggunakan sarung untuk bawahan dan sama sekali tidak mamakai atas alias bertelanjang dada. Hingga abad ke-15, ketika saudaragar-saudagar Arab-Muslim memenuhi kota-kota bandar Majapahit, perempuan-perempuan Jawa dipakaikan *kemben*—kadang ditulis *kamben*—untuk menutup dada untuk menghormati para saudagar muslim mulai risih.³⁹ Kata itu sendiri berarti ‘kain penutup dada’. Sementara daerah-daerah yang tidak mendapat pengaruh Islam, tetap bertelanjang dada, seperti di Bali (dan juga Batak—tetangga Minangkabau yang paling dekat⁴⁰) bahkan hingga awal abad ke-20 sebelum diberi penutup dada oleh orang Eropa.⁴¹ Di Batak misalnya, setelah menikah, perempuan hanya mengenakan selembur kain yang dililitkan di selangkangan, sementara bagian tubuh dari pinggang ke atas dibiarkan telanjang.⁴² Di Minangkabau, pakaian perempuan berkemungkinan juga mengalami perubahan seperti di

³⁹ Pramodya Ananta Toer, *Arus Balik*, Jakarta: Hasta Mitra, 1995; lihat juga Pramodya Ananta Toer, *Mangir*, Jakarta: Gramedia, 2000.

⁴⁰ Dario Novellino, "An ethnographic account of Batak basket-weaving knowledge, Palawan island, Philippines", *Indonesia and the Malay World* Vol. 37, No. 108 July 2009, pp. 203–224

⁴¹ Adrian Vicker (editor), *Bali Tempo Doeloe*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

⁴² Achim Sibeth, "The Batak: People of the Island of Sumatra", dalam Anthony Reid (editor), *Sumatra Tempo Doeloe*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

Jawa, hanya saja dengan waktu yang tidak sama. Ketika pengaruh Islam mulai terasa sejak abad ke-17 di pesisir Minangkabau, bagian tubuh dari lutut hingga ke pangkal dada bagian atas tentu telah ditutup dengan semacam kain. Bukti khusus tentang ini memang tidak memuaskan. Hanya ada catatan De Stuer tentang pakaian perempuan-perempuan di pegunungan Minangkabau, yang bekerja berat di sawah, atau bekerja mengambil air ke sungai atau mata air, mereka menggunakan hanya sarung (sepotong kain, 3 hasta panjang, lebar 1, tanpa jahitan) melilit pinggangnya. Pakaian seperti itu, kata De Stuers, akan sangat menyenangkan bagi mereka, apalagi ada bagian yang terbuka pada ujung pada salah satu pinggulnya, hal itu memudahkan gerakannya ketika mendaki.⁴³ Contoh secara visual dapat kita lihat pada masyarakat tetangga Minangkabau seperti penduduk di Asia bagian Tenggara (lihat gambar).

Dalam penyesuaian berikutnya, kain panjang itu kemudian juga diberi atasan berupa baju yang longgar dan tipis. Menurut A.A. Navis, seperti kutip Lukman, pada awalnya pakaian di Nusantara menyesuaikan dengan faktor geografis; longgar dan tipis adalah model yang paling cocok untuk masyarakat di iklim tropis, tetapi kita tidak tahu ‘masa awal’ mana yang dimaksud Navis maupun Lukman. Tetapi, baiklah untuk sementara kita pakai keterangan itu. Menurut Navis, pakaian perempuan terdiri dari kain panjang yang dipakaikan seperti sarung (*kodek*), baju yang longgar dan datar dari atas—bagian bawah belahan ketiak—hingga ujung bawah, dengan ukuran panjang hingga lutut. Pada kurun yang sama, mereka mungkin telah memakai penutup kepala. Pada acara-acara formal mereka memakai *tingkuluak tanduak*, yaitu kain dengan motif tertentu yang dibentuk seperti tanduk kerbau. Akan tetapi, di luar acara adat, mereka menggunakan penutup kepala seadanya (*tuduang*). Kain polos dililitkan sedemikian rupa sekedar menutup rambut, atau diletakkan begitu saja di atas kepala dengan sisi kanan-kirinya menjuntai ke bahu.⁴⁴

Fadli Lukman menyebut karya Navis itu "satu-satunya informasi yang ditemukan." Tentu saja masih ada beberapa sumber lain yang bisa dirujuk. Saya telah membaca dua kaba klasik, yang

⁴³De Stuers, *De Vestiging en Uitbreiding der Nederlander ter Westkust van Sumatra* Vol II, Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1849 p.34

⁴⁴Fadli Lukman, "Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala Muslimah di Sumatera Barat", *Musâwa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014.

saya anggap mewakili wilayah pedalaman dan wilayah pesisiran Minangkabau. Untuk yang pertama, adalah kaba *Rambun Pamenan*. Dalam kaba itu disebutkan tentang pakaian yang dipakai tokoh utama, ketika dalam perjalanan: “Alah dibukak malah pakaian, dibukak kain dangan baju ... tingga sarawa genggang sajo, sarato babaju pontong langan.” Untuk membungkus sesuatu, seorang laki-laki menggunakan ‘kain palangi’. Kain palangi ini adalah kain yang umum sekali digunakan sebab dalam kaba lain yang sebentar lagi kita ulas juga mencatat hal ini. Sayang sekali saya tidak dapat melacak seperti apa wujud kain palangi ini atau apa arti dari palangi itu sendiri. Sementara untuk pakaian yang dikenakan perempuan, tidak ditemukan keterangan dalam kaba ini. Padahal tokoh-tokoh perempuan dalam kaba itu cukup banyak, tetapi tidak ada keterangan satu pun tentang pakaian yang mereka gunakan.

Kaba kedua, yang saya anggap mewakili masyarakat pesisiran Minangkabau, kaba *Anggun nan Tongga*.⁴⁵ Sebagaimana kaba pertama, kaba ini juga tidak menggambarkan sedikitpun pakaian yang dipakai perempuan. Pakaian laki-laki di ruang publik, untuk ke gelanggang, digambarkan: “ ... sarawa pidandang guntiang Aceh, sajangka pucuk rabuangnyo, satumpak banang amehnya ... baju

⁴⁵ *Kaba Angun nan Tongga Magek Jabang* ditulis pertama kali dalam aksara Arab-Melayu tahun 1889. Amba Mahkota, seorang penulis Minangkabau, menulis ulanginya ke aksara Latin, yang diterbitkan pertama kali tahun 1960 oleh penerbit *Pustaka Indonesia* di Bukittinggi. Yang digunakan dalam tulisan ini adalah cetakan ketiga tahun 2009 oleh penerbit *Kristal Multi Media* Bukittinggi. Di pedalaman Minangkabau, *kaba* ini sering disebut *Sijobang*. Bersijobang berarti memainkan *kaba* ini. Latar cerita *kaba* ini adalah wilayah maritim pantai barat Sumatera, Tiku-Pariaman. Alur narasinya melebar ke dunia perbajauan atau bajak laut di Lautan Hindia. Dari pesisir pantai menuju pulau-pulau tengah lautan. Dunia maritim mendapatkan aspek penceritaan yang dominan. Kehidupan di pedalaman Minangkabau tidak diceritakan begitu banyak. Darek (daerah pedalaman), yang direpresentasikan oleh ‘Gunung Ledang’, adalah tempat bertapa orang-orang dari daerah rantau-pesisiran Minangkabau. Bertapa—yang dalam bahasa Minangkabau disebut *batarak*. Latar temporal *kaba* itu berkisar sebelum orang Belanda datang. Narasi tentang Eropa hanya sedikit dicatatkan, yaitu tentang Peranggi [Portugis] yang berkuasa di bandar Malaka. Juga ada disebut mengenai keberadaan meriam-meriam, namun tentu saja itu tidak menjadi penanda telah adanya penetrasi kolonial Eropa ke daerah pesisir Minangkabau itu. Sebab jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa, kapal-kapal orang Melayu telah pula dilengkapi meriam. Lihat: Amba Mahkota, *Kaba Klasik Minangkaba: Anggun nan Tongga* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009); Keterangan yang lebih elaboratif mengenai *kaba* ini lihat: Nigel Phillips, *Sijobang: Song narrative poetry of West Sumatra*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).

biludu, guntieng nan caro Sialahan.” Pada kaba ini juga disebut beberapa aksesories yang dipakai laki-laki seperti ‘kabek pinggang’ (p.14), ‘kain palangi’ (p.12), ‘deta palangi’, dan ‘karih pandak Jawo’ (p.19-20).

Setelah melacak sumber lokal, dan hanya mendapatkan informasi seadanya, kita mungkin perlu melacak karya-karya naturalis dan etnolog Eropa. Karya etnolog Yahudi-Amerika, Edwin M. Loeb, *Sumatra: Its History and People* yang pertama kali terbit di Wina pada 1935, sama sekali tak mencatat tentang pakaian perempuan, sekalipun dia menyediakan setengah halaman bukunya untuk membahas pakaian formil dan keseharian laki-laki (p.119).⁴⁶ Untuk itu, baiklah kita rujuk yang lebih tua, berasal dari abad ke-18, salah satu yang cukup informatif adalah karya etnolog Inggris, yang lama bermukim di Bengkulu (Bengkulu) pada 1779, William Marsden, yang menulis sebuah karya penting tentang Sumatra, *History of Sumatra*, yang diterbitkan kemudian setelah dia kembali ke Eropa pada 1812.

Banyak aspek tentang Sumatra yang dibicarakan dalam *History of Sumatra*. Sementara tentang pakaian memang hanya disinggung sedikit. Orang-orang Melayu, kata Marsden, menggunakan pakaian yang bahannya " ... diimpor dari Sulawesi atau Bugis--nama setempat untuk negeri itu."⁴⁷ Kadang-kadang, kain itu juga disebut “kain Makassar”.⁴⁸ Lebih jauh Marsden tidak menjelaskan bagaimana model dan coraknya. Marsden secara khusus justru membicarakan penutup kepala, tidak pakaian untuk penutup tubuh yang lain, kita tidak tahu kenapa begitu. Dalam buku itu Marsden menjelaskan bahwa: "Kaum wanita tidak memakai tutup kepala, kecuali ornamen dan bunga." Tidak dijelaskan lebih jauh bagaimana bentuk ornamen tersebut. Hanya disebutkan Marsden, "Ornamen itu merupakan hasil pekerjaan yang banyak memakan waktu, keahlian, dan ketelitian." Karena tidak memakai penutup kepala, rambut ditata sedemikian rupa. Lebih lengkap kita kutipkan:

⁴⁶ Edwin M. Loeb, *Sumatra: Sejarah dan Masyarakatnya*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

⁴⁷ William Marsden, *History of Sumatera*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, p. 49-50

⁴⁸ F. C. Wilsen, *Lain Dooeloe, Lain Sakarang, of Voorheen en Thans Shetsen Uit Oost Indie*, Amsterdam: Firma Meijer, 1868 p. 295

"Ada dua cara menata rambut. Satu disebut konde dan satu lagi sanggul. Konde berbentuk mirip rambut perempuan Cina yang sering kita lihat di gambar, yaitu rambut yang digulung berbentuk lingkaran di tengah kepala dan dikuatkan dengan tusuk konde dari perak ... tatanan rambut memakai konde itu mereka tiru dari Cina. Cara yang satu lagi, yaitu sanggul, lebih banyak dipakai. Sanggul dibuat dengan cara menggulung rambut sekali ke belakang, kemudian ujung rambut dimasukkan ke dalam gulungan."⁴⁹

Di ruang publik, perempuan golongan atas memakai selendang. Istri-istri penghulu kepala atau perempuan-perempuan milik raja, misalnya, "memakai selendang *dengan cadar* apabila berjalan-jalan di luar. Saputangan pun tidak lupa mereka bawa. Saputangan itu dilipat kecil di tangan atau dilipat panjang lalu dibawa di atas bahu," begitu tulis Marsden. Kita tidak tahu apa yang dimaksud Marsden *dengan cadar*—mungkin itu adalah selendang yang diselempangkan ke bawah muka untuk menutupi hidung dan mulut yang masih sering kita temui di generasi ibu-ibu atau nenek-nenek kita zaman ini. Kita juga tidak tahu persis maksud dari saputangan—saya pikir yang dimaksud adalah sejenis kain untuk diselempangkan di atas bahu atau pundak. Kecuali itu, secara umum memang masyarakat kebanyakan membiarkan rambutnya terbuka.

Stimulus Ekonomi: Kain yang Menjuntai ke Lantai

Kondisi ekonomi bisa menentukan kepemilikan bahan dan pakaian yang digunakan oleh tipe atau jenis struktur masyarakat yang berbeda, dan karena tulisan ini fokus bukan di pakaian seremonial adat, hanya pada pakaian keseharian, faktor kondisi ekonomi menjadi semakin penting dalam penentuan pakaian yang digunakan dalam masyarakat maupun individu. Pada sebelum Padri, pakaian yang layak cukup mahal dan tidak setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan sandang, sehingga selembur kain (sarung) yang dijahit, di samping fungsinya yang praktis, juga memperlihatkan kemampuan seseorang atau keluarga untuk membeli atau memiliki sandang. Semakin bagus kehidupan ekonomi, tentu semakin besar pula akses terhadap kain dan pakaian. Dan hal ini tentunya akan memperlihatkan

⁴⁹ William Marsden, *History of Sumatera*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008, p. 50

struktur dan strata sosial masyarakat saat itu, yang mempengaruhi *appearance* atau tampilan seseorang atau keluarga. Sehingga, terutama menjelang masa Padri, walau akses ke pakaian memadai sebab faktor ekonomi, tapi bisa saja dari pandangan Padri itu tidak Islami, atau malah dianggap berlebih-lebihan dalam hal berbusana (apalagi untuk pakaian seremonial adat). Jadi, yang dipermasalahkan kaum Padri saat itu adalah tidak saja cara berpakaian yang tidak Islami, dalam artian bukan tidak atau kurang berpakaian (alias hanya selembur sarung berjahit) yang dipakai masyarakat umum, tetapi juga adalah sisi berlebih-lebihan di kalangan elite tertentu yang sedang menikmati kemakmuran akibat stimulus ekonomi.

Sisi yang juga menarik adalah kasus pesisir dan darek tentu berbeda. Apakah dengan begitu, pesisir lebih "islami" dari darek? Islam dan cara berpakaian muslim sudah dikenal dan familiar di wilayah Pesisir, dan mungkin baru sedikit dikenal untuk wilayah darek. Tapi tidak otomatis Pesisir lebih Islami. Pakaian yang lebih islami sudah dikenal dan familiar bagi masyarakat Pesisir karena disebabkan akses ke pelbagai jenis dan tipe busana sudah lebih beragam. Ibaratnya Pesisir lebih egaliter dan metropolis, penuh dengan berbagai macam busana, sedangkan darek cenderung statis dan homogen. Akses ke perdagangan dunia juga relatif dekat karena malah menjadi bagian dari rute perdagangan. Logika sederhana kalau bicara Pesisir semisal Pariaman, Tiku, dan Air Bangis, sudah jelas itu wilayah kekuasaan Aceh dan pengaruh Islam besar di sana sudah sejak abad ke-16 atau sekurang-kurangnya sejak abad ke-17. Sekaligus wilayah-wilayah tersebut juga daerah perdagangan yang dikunjungi etnis lain seperti Cina, India, Arab, Parsi, Belanda dan Inggris.

Apakah masyarakat Minangkabau memproduksi kain? Ada dua pusat tenun yang tertua saat ini, Pandai Sikek dan Silungkang, tapi seberapa tua keduanya? Tenun dan cara membuat pakaian baru dikenal abad ke-19 setelah Perang Padri. Hampir semua bahan pakaian sebelum itu umumnya didatangkan dari luar. Sutra yang didatangkan dari Cina, Bugis atau mungkin Jawa; kain biasa yang tidak mahal seperti katun dan belacu umumnya dari India dan negara di sisi barat pulau Sumatra. Dalam Dobbin kita membaca, bahwa Minangkabau mengeksport hasil alam keluar, tapi mendatangkan (salah satunya) bahan sandang yang dibawa orang-orang India dan

Timur Tengah ke sini, dan pedagang Cina membawa sutra. Sampai awal abad ke-20, pedagang di Pasa Gadang Muaro Padang paling banyak berdagang kain yang didatangkan dari luar oleh pedagang Keling dan Arab serta Aceh, khusus untuk bahan pakaian umum.⁵⁰ Itu menandakan bahwa tidak ada produksi bahan sandang di wilayah Minangkabau. Kalaupun ada tenunan, itu bukan bahan sandang dipakai harian atau umum.

Lalu kenapa orang Minangkabau atau mungkin Sumatra secara umum tidak memproduksi kain? Apakah karena bahan mentahnya tidak tersedia di sini? Atau teknologinya belum ada? Saya lebih melihat ini secara luas, bahwa lahan untuk kapas dan pohon lain penghasil bahan sandang butuh daerah yang luas, sedangkan Minangkabau daerah berbukit dan sempit yang lebih cocok untuk lahan produk konsumsi atau bahan yang lebih laku dijual langsung setelah panen daripada diproses lanjutan yang tidak menaikkan harga jual.

Di Bawah Kuasa *Kaoem Poeti*'

Lalu bagaimana Padri telah memberi pengaruh pada pakaian perempuan? Untuk menjawab itu, mula-mula saya menelisik dua buku penting yang berasal dari zaman yang masa ditulis oleh orang yang terlibat langsung. Kedua buku itu, yang telah dikutip juga di sana sini sebelumnya, memang nyaris tidak bisa diharapkan untuk menjabarkan pasal ini. Kedua buku yang telah kita kutip di atas tidak satu kata pun menjelaskan apa yang kita harapkan. Sebab pikiran keduanya jelas bukan pikiran masyarakat Melayu sekarang yang sadar bahwa pakaian adalah aspek penting yang harus dicatat. Pakaian bukanlah aspek penting untuk diabadikan, hal tersebut tidak akan mengalahkan kepentingan menceritakan penaklukan atau perang atau sejenisnya yang memang mendominasi narasi dalam dua naskah ini.

Tetapi sumber-sumber Barat mencatatnya, sekalipun tidak dapat memuaskan hasrat keingintahuan kita akan itu yang begitu berlebihan. Buku pertama, ditulis seorang Letnan, J.J. de Stuer, seorang yang pernah bertugas di garda depan pasukan Belanda ketika

⁵⁰ Dobbin, p.?

berhadapan dengan Padri, menulis dua jilid laporan panjang.⁵¹ Catat De Stuers, sejak Padri-padri menguasai kampung-kampung dataran tinggi, terutama sejak Tuanku nan Renceh melancarkan perangnya yang berhasil, hukum yang ketat telah diterapkan di kampung-kampung yang berada di bawah Padri. Padri telah mengganti pakaian normal mereka dengan pakaian panjang mencapai ke pergelangan kaki, laki-laki memakai jenggot sebagai tanda, dan kepalanya dipakaikan sorban putih. Lebih lengkap kita kutipkan:

Het geregeld bidden in de Missigits (Moskeen), het baden met bekleeding en afgescheiden van de vrouwen, warden wetten, waarvan de overtreding met boete, en soms met den dood gestraft werd. (Para Padri bersembahyang rutin di masjid, mandi dengan pakaian, dan terpisah dari perempuan, jika dilanggar akan dihukum dengan penebusan dosa, kadang-kadang hukumanya dibunuh).⁵²

Raffles, yang memasuki pedalaman Minangkabau pada saat di daerah itu tengah berkecamuk perang, melaporkan gambaran yang dilihatnya: “ ... kami dibuat terpesona oleh kostum rakyat, seluruh yang dibalut sesuai dengan kostum orang putis (orang putih), atau Paderi, artinya, putih atau biru, dengan turban ... sesuai dengan tata cara Tuanku Pasaman, reformis agama. Tidak terbiasa mengenakan turban, ... orang-orang miskin ini membuat penampilan yang menyedihkan dengan kostum baru mereka.”⁵³

Lalu bagaimana gambaran pakaian perempuan? De Stuers mencatat bahwa di kampung-kampung di bawah Padri *"Ook de vrouwen moesten hunne korte en op zijde tot op de heup zich openende rokjes, tegen lange kleederen verwisselen en het hoofd met eenen sluijer bedekken,"*-- "Para wanita juga harus mengganti rok pendek mereka yang terbuka di pinggul, menukarnya dengan gaun panjang, dan menutupi kepala mereka dengan cadar," catat De

⁵¹ De Stuers, *De Vestiging en Uitbreiding der Nederlander ter Westkust van Sumatra* Vol II, Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1849 p.33

⁵² De Stuers, *De Vestiging en Uitbreiding der Nederlander ter Westkust van Sumatra* Vol II, Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1849 p.33

⁵³ *Memoir of the Life and Public Service of Sir Thomas Stamford Raffles by His Widow*, Vol.I (edisi kedua). Anthony Reid (editor), *Sumatra Tempo Doeloe*. Jakarta. Komunitas Bambu, 2008

Stuers.⁵⁴ Dari sebuah gambar dalam laporan yang sama, setidaknya dapat dijelaskan ada 3 model pakaian perempuan Padri masa itu. Pakaian untuk anak-anak dan remaja, pakaian untuk dewasa gadis, dan pakaian untuk yang sudah beristri. Kita tidak tahu persisnya pembagiannya. Tetapi Rosihan Anwar menulis, mengutip sebuah buku berbahasa Belanda, *Het einde van de Padrie-oorlog*, “Kaum perempuan yang mengunjungi pasar, bila memakai tutup kepala berwarna merah (rode kap, kata penulis Belanda), maka itu adalah tanda bahwa perempuan itu sudah memasuki usia kawin dan masih perawan. Perempuan lain memakai tutup kepala warna merah dan putih, atau biru dan merah. Asal tahu saja.”

Gambar 4: Perempuan Minangkabau pada periode Padri



Sumber: De Stuers, *De Vestiging en Uitbreiding der Nederlander ter Westkust van Sumatra* Vol II, Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1849 p.34

Gambar 5. Het hospitaal in Padang, Louis Henri Wilhelmus Merkus de Stuers, 1826.



Sumber. kitvl.nl

⁵⁴ De Stuers, *De Vestiging en Uitbreiding der Nederlander ter Westkust van Sumatra* Vol II, Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1849 p.33

Khusus kepada perempuan, mereka mengharuskan memakai kerudung. Kepada perempuan dewasa, lebih ketat lagi, perempuan Paderi terselubung dan mengenakan pakaian hitam. Tidak ada bagian tubuh yang boleh dihiasi dengan perhiasan emas dan pakaian sutra. Terutama sejak Renceh, Dobbin mencatat: " ... orang harus mengenakan pakaian putih sebagai lambang kesucian, *para wanita harus menutupi wajahnya* dan para pria membiarkan janggutnya tumbuh, tidak boleh memakai perhiasan emas, dan pakaian sutra harus dijauhi."⁵⁵ Kaum wanita harus menukar rok pendek mereka dengan pakaian yang menutup bagian badan mereka, dan kepala mereka harus ditutup dengan jilbab.⁵⁶

Raffles tentang pakaian perempuan di bawah Padri melukiskan:

The women, who are also clad in white or blue cloth, do not appear to the best advantage in this new costume, many of them conceal their heads under a kind of hood, through which an opening is made sufficient to expose their eyes and nose alone. (Para wanita, yang juga dibalut dengan kain putih atau biru, tampaknya tidak memiliki keuntungan terbaik dalam kostum baru ini, banyak dari mereka menyembunyikan kepala mereka di bawah sejenis tudung, di mana sebuah lubang terbuka hanya cukup untuk memaparkan mata dan hidung mereka.)⁵⁷

Seorang Letnan 1 Infanteri Belanda, J.C. Boelhouwer, melaporkan:

Saya sangat heran melihat di rumah di hadapan tempat kami tampak dua orang perempuan atau gadis Padri tanpa cadar. Biasanya perempuan Padri selalu menutup wajah mereka. Saya sangat heran karena saya jarang melihat perempuan-perempuan yang lebih cantik. Melihat warna kulit mereka,

⁵⁵ Dobbin, 2008, p. 210; lihat juga Dobbin, 1976, "Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century," *Modern Asian Studies*, VIII, 3, pp. 319-56.

⁵⁶ Suriadi, *Syair Sunur: Teks dan Konteks 'Biofrati' Seorang Ulama Minangkabau Abad ke-19*. Citra Budaya. Padang. 2004.

⁵⁷ *Memoir of the Life and Public Service of Sir Thomas Stamford Raffles by His Widow*, Vol. I (Edisi Kedua). Anthony Reid (editor), *Sumatra Tempo Doeloe*. Jakarta. Komunitas Bambu, 2008

boleh bertanding dengan perempuan Eropa. Dua wajah yang sangat bagm. Tetapi tidak lama saya dapat nikmati ini karena tiba-tiba jendela itu ditutup dengan keras.⁵⁸

Jika larangan-larangan berpakaian itu dilanggar, yang melanggar akan dijatuhkan hukuman, mulai dari hukuman denda hingga hukuman mati: “... lutut terbuka didenda 2 suku; wanita yang tidak pakai burka didenda 3 suku; memukul anak didenda 2 suku ... jika mengulanginya dihukum mati.”⁵⁹

Namun, gambaran itu, catat Raffles, hanya ditemukan di kampung-kampung di bawah rezim Padri. Kampung-kampung di luar itu, masih berpakaian dengan cara pra-Padri—belum terpengaruh pembaharuan yang dilakukan Padri. Raffles mencatat: “Tetapi kami memperhatikan beberapa adat berpakaian yang mungkin tidak berkaitan dengan pembaharuan sekarang ini. Para perempuan dewasa masih membelah tengah rambut mereka dan menyisir rambutnya ke samping, sementara anak-anak perempuan maupun perempuan-perempuan muda memegang rambut mereka ke belakang mengikuti gaya rambut orang Cina.” Mereka tidak memiliki penutup kepala. Buktinya, Raffles dapat menggmbarkan dengan detail anting-anting pada telinga mereka. “Anting tersebut biasanya memiliki diameter sekitar dua inci [kurang lebih enam sentimeter] dan diberi hiasan yang berbeda-beda; ada anting kayu dan dihias dengan perak, ada pula anting tembaga, dan sebagainya.”⁶⁰

Jejak-jejak Setelah Padri

Pada masa Tuanku nan Renceh dan Tuanku Pasaman, kampung-kampung mungkin telah dipaksa untuk memakai pakaian ala Padri, termasuk terhadap perempuan. Tetapi setelah itu, telah

⁵⁸ J.C. Boelhouwer, *Kenang-Kenangan di Sumatra Barat Selama Tahun 1831-1834*, terjemahan Sutan Syahrial dari *Herinneringen van mijn verblijf op SUMATRA'S WESKUST Gedurende de jaren 1831 -1834*. Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Gerakan Padri (1803-1838), Gemu Minang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, dan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, p. 104

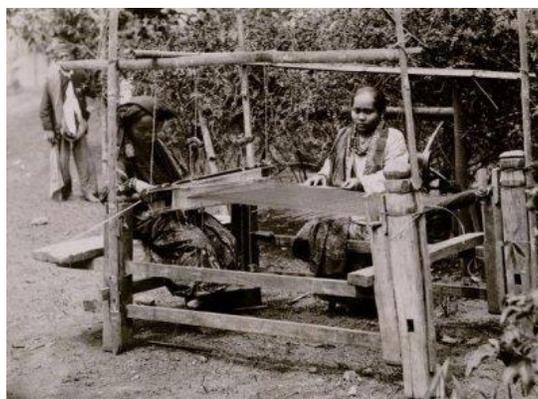
⁵⁹ Dobbin Christine, “Manifestations De L'Islam, Islamic Fervour as a Manifestation of Regional Personality in Colonial Indonesia: The Kamang Area, West Sumatra, 1803-1908”, *Paris, Archipel*, 1998.

⁶⁰ *Memoir of the Life and Public Service of Sir Thomas Stamford Raffles by His Widow, Vol.I* (edisi kedua). Anthony Reid (editor), *Sumatra Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008

terdapat kelonggaran. Apalagi setelah Padri dikalahkan, dan Belanda dengan berhasil menciptakan *Padriphobia* di tengah masyarakat Minangkabau secara luas. Orang-orang takut menjadi Padri atau mengantarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah di bawah pengasuhan tuanku-tuanke yang pernah berafiliasi kepada Padri di masa lalu.⁶¹

Tetapi tampaknya memang tidak otomatis dengan mudarnya pengaruh Padri, orang-orang Minangkabau kembali ke pakaian ‘jahiliah’ mereka (dalam artian pakaian yang relatif terbuka). Baju kurung yang longgar adalah pakaian umum untuk perempuan. Tingkuluak tanduak dengan berbagai variannya digunakan sebagai menutup kepala. Selendang menjadi sangat fungsional, bisa di atas kepala bisa juga hanya disampirkan di bahu. Kita mula-mula akan melihat pakaian keseharian perempuan di rumah. Foto berikut ini jelas telah diset, sebab mesin tenun tidak diletakkan di tempat terbuka, sebab itu sama artinya membiarkannya lapung oleh hujan dan panas. Tetapi setidaknya-tidaknya gambaran ini telah menunjukkan pakaian perempuan di ranah domestiknya. Mereka memakai baju kurung minim monif, seorang di antaranya memakai penutup kelapa berupa tingkuluak, tetapi seorang lain membiarkan rambutnya terlihat, selendangnya hanya dililitkan pada leher.

Gambar 6. Perempuan Minangkabau yang menenun 1895.



(Sumber : www.kitlv.nl)

⁶¹ Wisran Hadi, *Empan Lakon Perang Padri*, Bandung: Angkasa, 2003, khususnya bag. 4, “Penyeberangan Syekh Abduljalil Tuanku Sembahyang”.

Kalau ingin melihat perempuan di ruang yang lebih privat, gambar di bawah ini adalah gambaran perempuan Minangkabau di ruang yang termasuk paling privat. Tandaih atau tandas memang setengah-setengah juga memberikan privasi. Foto ini memperlihatkan rutinitas sehari-hari perempuan Minangkabau di tepi sungai. Foto ini bertarih 1885. Ini sebuah foto yang ‘aneh’ untuk ukuran gambaran atas citra Minangkabau yang terbangun selama ini. Gambaran dalam foto ini mungkin hanya ada di Bali, tetapi kita menemukannya di Minangkabau, sekalipun jeas mengandung nilai yang berbeda—yang pertama di segala ruang (publik maupun privat), sementara yang kedua di ruang privat semata. Foto ini mungkin saja diset oleh tukang foto; tukang fotonya jelas adalah laki-laki—laki-laki Eropa, sebab tidak tercatat satupun tukang foto yang perempuan pada periode ini; tetapi juga bisa diambil tanpa disete terlebih dahulu, diambil dari seberang sungai atau dari atas perahu misalnya. Aneh juga, perempuan-perempuan ini, jelas tidak lagi gadis, tak melindungi dada mereka dari pandangan mata si tukang foto. Kita seperti melihat ilustrasi-ilustrasi yang lebih awal, bagaimana perempuan Minangkabau menganggap dada sebagai bagian tubuh yang tidak mesti dilindungi dengan ketat. Tetapi perempuan yang paling kiri dan yang berdiri terlihat lebih muda di antara yang lainnya, dan mereka tidak berpakaian dengan lengkap, terlihat agak malu-malu, mereka menutupi kepalanya dengan kain dan tangannya. Foto ini anggaplah hanya pengecualian, sebab gambaran-gambaran lain menampilkan perempuan-perempuan Minangkabau yang relatif tertutup. Sementara foto-foto ini adalah pakaian perempuan di ruang publik, di jalan raya dan pasar. Dari foto-foto itu pakaian perempuan Minangkabau umumnya adalah baju kurung tanpa ornamen. Remaja dan orang dewasa menggunakan tekuluak, bawahannya sarung batik (kain *jao--* Jawa), anak-anak tidak pakai sarung dan tekuluak.



Gambar 7.

Kegiatan Perempuan di Tepi
Sungai pada 1880-an.

(Sumber: Selfi Mahat Putri,
Perempuan dan Modernitas)

Gambar 8. Perempuan Minang dan seorang anak dengan dagangan yang akan dijual di Pasar Agam (1880).



(Sumber : www.kitlv.nl).

Gambar. 9 Pedagang Perempuan di Pasar Payakumbuh (1911)



Sumber: Rusli Amran, *Sumatra Barat Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981, p.143).

Lalu ketika sekolah-sekolah khusus perempuan berdiri setelah memasuki abad ke-20, perempuan mulai memikirkan pakaian formal sekolah, bukan lagi pakaian formal adat. Kita tidak memasukkan pembahasan yang pertama ke dalam tulisan ini, tetapi tentang yang kedua kita perlu menyinggungnya, sebab lingkungan sekolah karena rutinitasnya telah menjadi lingkungan keseharian perempuan, setidaknya

tidaknya sejak satu atau dua dasawarsa awal abad ke-20. Di Amai Setia, pakaian keseharian masih nampak jelas. Baju kurung tanpa ornamen, dengan kain sarung sebagai bawahannya. Tidak ada tingkuluak, tetapi selendang adalah pemandangan yang umum untuk menutup kepala. Beberapa siswa tampak membiarkan rambutnya kelihatan, dan hanya menyampirkan selendangnya pada pundak.

Sementara, di sekolah-sekolah agama yang lebih modern, di Diniyah Putri misalnya, atasannya juga masih memakai baju kurung tanpa ornamen, tetapi bawahannya sendiri telah berganti dengan sejenis rok—masih berupa kodek atau kain sarung yang telah dijahit. Pendirinya memperkenalkan gaya penutup kepala unik, sebuah model berpakaian baru yang dikenal luas sebagai *mudhawarah*, yang juga dikenal lebih akrab dengan sebutan *lilik*, karena cara pemakainnya yang dililitkan sedemikian rupa ke kepala.



Gambar 10.

Kegiatan Perempuan
di Kerajinan Amai
Setia pada 1915

Sumber: Selfi Mahat Putri, *Perempuan dan Modernitas*



Gambar 11

Kegiatan Perempuan
di Kerajinan Amai
Setia pada 1915

Sumber: Selfi Mahat Putri, *Perempuan dan Modernitas*

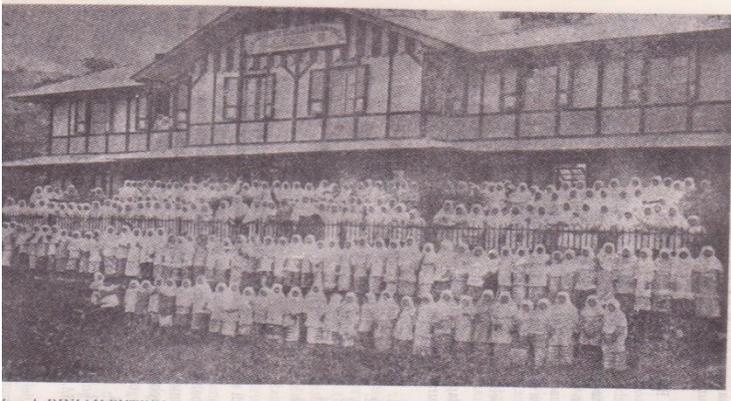


Gambar 12

Kegiatan Perempuan
di Kerajinan Amai
Setia pada 1915

(Sumber: Selfi Mahat
Putri, *Perempuan dan
Modernitas*)

Gambar 13. Murid-murid Diniyah Putri pada 1930an



(Sumber: Selfi Mahat Putri, *Perempuan dan Modernitas*)

D. Pakaian dan Modernitas

Berakhirnya periode Padri dapat memungkinkan harmonisasi dan integrasi Islam dan tradisi. Sekalipun, Islam tetap menjadi basis perdebatan pada abad kemudian, pada sepanjang abad kedua puluh. Pada kurun ini, persoalan keislaman dalam masyarakat Minangkabau menjadi semakin kompleks ketika praksis baru muncul: Barat. Pada paruh terakhir abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20, upaya integralitas itu tidak hanya melibatkan Islam dan tradisi, tetapi juga telah melibatkan suatu gejala baru yang bernama modernisme.⁶² Dalam

⁶² Taufik Abdullah, "Adat and Islam: An examination of conflict in Minangkabau", *Indonesia*, no.2 (October 1966), hlm. 1-24.

Islam sendiri, kelompok pembaharu Islam yang sering diistilahkan sebagai Kaum Muda adalah kelompok yang paling banyak menyerap ide-ide modernisme ini. Perbenturan antar praksis ini juga tidak kalah kerasnya. Bahkan sampai paruh kedua abad ke-20, berbagai praksis itu tetap mewarnai sejarah masyarakat Minangkabau.

Setelah berakhirnya zaman Padri, pemerintah kolonial Belanda segera mengambil tampuk kepemimpinan dalam agenda ‘mengamankan negeri’. Kampanye-kampanye anti-Padri telah berlangsung bahkan sebelum Perang Padri benar-benar berakhir. Kampanye-kampanye itu tampaknya telah menang dan memperoleh hasil yang menggembirakan bagi satu pihak. Masyarakat Minangkabau pasca-Padri merasa bahwa gerakan-gerakan radikal ala Padri tampak benar-benar keliru, mengantarkan masyarakat Minangkabau ke dalam huruhara yang berujung kepada kehancuran. Pada titik ini, modernitas, zaman kemajuan, yang dibawa oleh pemerintah Belanda, menjadi alternatif yang ditawarkan dengan giat. Setelah 1920an, modernitas mencapai puncaknya di Hindia Belanda, juga di Sumatra Barat. Pakaian sebagai kulit sosial dan budaya akan menampilkan pengaruh itu dengan jelas. Di ruang-ruang pertemuan atau rapat akbar, perempuan-perempuan Minangkabau mulai memakai rok dan rompi. Mereka tidak lagi menutup rambut mereka atau menyanggulnya, tetapi telah ada yang memotong pendek dan menggeraikannya. Di ruang publik, beberapa perempuan modern Minangkabau memakai rok pendek yang menampakkan lututnya dan baju tanpa lengan.

Gambar 14. Rapat yang dilakukan oleh sebuah perkumpulan (1930)



(Sumber: www.kitlv.nl).

Gambar 15. Himpoenan Putri Noenang 1936



(Sumber: *Pandji Poestaka*, No. 105, Thn XV, 31 Desember 1937).

Gambar 16. Grup Musik Perempuan di Sumatra Westkust pada 1935.



(Sumber: Album afkomstig van Djoesa Anas te Den Haag dalam www.kitlv.nl).

Gambar 17. Wanita Minang Modern pada 1924



(Sumber: Antiquariaat Minerva di Den Haag, KITLV www.kitlv.nl).

E. Penutup

Bentuk pakaian setelah Padri hingga awal abad ke-20 di Minangkabau adalah semacam kompromi antara identitas tradisional, pelaksanaan ajaran agama Islam, dan upaya mengikuti gerak-laju modernitas zaman di sisi lain. Sehingga kemudian di Minangkabau tercipta masyarakat Islam yang moderat sekaligus modern, yang tetap bisa mengikuti kemajuan zaman, yang dapat terlihat dari busana kehidupan harian mereka. Kompromisasi itu didahului oleh semacam konflik (zaman Padri); semacam tahapan yang harus dilalui sebelum akhirnya kompromi mengambil peran. Bukan berarti cara berpakaian orang Minangkabau sebelum itu tidak islami—hal itu tergantung kondisi ekonomi dan sisi praktis yang memang dibutuhkan, terutama kaum wanita untuk tetap bergerak dinamis. Akan tetapi, tampaknya, sejauh ini, pada tataran pakaian, kaum Padri lebih memaksakan cara mereka dalam berpakaianlah yang kemudian menimbulkan konflik.

Setelah zaman Padri usai, pakaian wanitanya bukan apa yang dipaksakan ala Padri yang serba tertutup itu, tapi cukup hanya syarat "tetap menutup aurat" telah terpenuhi. Dan selendang, sebagai salah satu penanda kompromisasi itu, multi-fungsi, bisa jadi penutup kepala dan jilbab walau bukan menutup secara menyeluruh, alias bisa menyesuaikan. Plus baju kurung dengan berbagai variasinya tetap bisa dianggap Islami. (Pada pakaian laki-laki bahkan lebih jelas lagi tergambar: Timur tengah di kepala, di badan Eropa, dan di bawah sarungan pribumi). Bawahan perempuan sudah bercorak Eropa para kurun ini, mereka tidak lagi pakai sarung, tetapi telah pakai rok, sekalipun dari kain panjang juga, hanya sudah dijahit sedemikian rupa menyerupai rok gaya Barat. [.]

Referensi

- Achim Sibeth, "The Batak: People of the Island of Sumatra", dalam Anthony Reid (editor), *Sumatra Tempo Doeloe*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Achmad Sunjayadi, "Mengabadikan estetika. Fotografi dalam promosi pariwisata kolonial di Hindia-Belanda", *Wacana*, Vol. 10 No. 2, Oktober 2008 (p.201-316)
- Adrian Vicker (editor), *Bali Tempo Doeloe*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Ambas Mahkota, *Kaba Klasik Minangkaba: Anggun nan Tongga*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.
- Nigel Phillips, *Sijobang: Song narrative poetry of West Sumatra*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Ayu Septiani, "Perubahan Gaya Pakaian Perempuan Bangsawan Pribumi di Jawa Tahun 1900-1942" *Jurnal Candrasangkala*, Vol 1, No 1, November 2015.
- B. J. O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*, Jakarta: Bharata, 1973.
- Catherine L. Howey, "Dressing a Virgin Queen: Court Women, Dress, and Fashioning the Image of England's Queen Elizabeth I", *Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal*, 2009, Vol. 4 (p.201-2018).
- Christine Dobbin, "Islamic Revivalism in Minangkabau at the Turn of the Nineteenth Century," *Modern Asian Studies*, VIII, 3 (1974), p. 319-56.
- Christine Dobbin, *Islamic revivalism in a changing peasant economy: Central Sumatra 1784-1847*, London: Curzon Press, 1983, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Clare Hibbert, *A history of fashion and costume. Vol 8. The Twentieth Century*, Bailey Publishing Associates Ltd 11a Woodlands, 2005.

- Dario Novellino, "An ethnographic account of Batak basket-weaving knowledge, Palawan island, Philippines", *Indonesia and the Malay World*, Vol. 37, No. 108 July 2009, p. 203–224.
- De Stuers, *De Vestiging en Uitbreiding der Nederlander ter Westkust van Sumatra* Vol II, Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1849.
- Dedi Arsa, "Cerita Pendek dan Celana Pendek", *Padang Ekspres*, 12 Juli 2017.
- Dwi Ratna Nurhajarini, "Kain Kebaya dan Rok. Pakaian Perempuan Yogyakarta Awal Abad ke-20", Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2015.
- Elif Rahmayanti, "Pengaruh Eropa Terhadap Perkembangan Mode Busana Harian Wanita di Jawa 1870-1942". Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2016.
- Elizabeth Wilson, *Adorned in Dreams, Fashion and Modernity*, I B Tauris & Co Ltd; Rev. ed edition (30 Oct. 2009)
- F. C. Wilsen, *Lain Dooeloe, Lain Sakarang, of Voorheen en Thans Shetsen Uit Oost Indie*, Amsterdam: Firma Meijer, 1868.
- Fadli Lukman, "Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala Muslimah di Sumatera Barat", *Musâwa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014.
- Henk Schulte Nordholt (editor), *Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia*, KITLV Press, 1997.
- Henk Schulte Nordholt, "Negara di atas kulit: Pakaian, Sepatu dan Kerapian", dalam *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Ibrahim Anwar dkk., *Pakaian Adat Tradisional Daerah Sumatra Barat*, Jakarta: Depdikbud & Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985.
- Jeffrey Hadler. *Muslims and matriarchs: cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism*. Ithaca, New York: Cornell. University Press. 2008. (Terjemahan dalam bahasa Indonesia diterbitkan tahun 2010 dengan judul *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute)

- Jugiarie Soegiarto, "Wacana kolonial dalam film Moeder Dao, de schildpadgelijkende", *Wacana*, Vol. 10 No.2, Oktober 2018 (p.317-347)
- Melani Budianta. "Budaya, Sejarah & Pasar: New Historisisme dalam Perkembangan Kritik Sastra", *Jurnal Susastra*, Vol 2, No 3, Tahun 2006.
- Memoir of the Life and Public Service of Sir Thomas Stamford Raffles by His Widow, Vol. I (edisi kedua). Anthony Reid (editor), *Sumatra Tempo Doeloe*. Jakarta. Komunitas Bambu, 2008
- Nilay Kayaalp, "Fashion in Venice: An Expression of Modernity", *YTÜ Arch. Fac. E-Journal*, Volume 3, Issue 2, 2008, (p.124-136)
- Philip Steele, *A history of fashion and costume. Vol 2. The medieval world*, Bailey Publishing Associates Ltd 11a Woodlands 2005, p. 36-61.
- Puti Reno Raudha Thaib, *Pakaian Adat Perempuan Minangkabau*, Padang: Penerbit Bundo Kandung, 2014.
- Rudolf Mrazek, *Engineers of Happy Land Technology and Nationalism in a Colony*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Selfi Mahat Putri, "Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20", Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2015.
- Sri Bekti Yulitasari "Pengaruh Eropa Terhadap Gaya Berpakaian Bumiputra di Yogyakarta (1900-1942)" Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, 2016.
- Sutan Mangkudun & Ilyas Sutan Pangaduan, *Kaba Klasik Minangkabau: Kaba Rambun Pamenan*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2004.
- Syafnir Aboe Nain, (transliterato), *Naskah Faqih Shagir*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004.
- Syafnir Aboe Nain, (transliterato), *Naskah Tuanku Imam Bonjol*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005.

- Taufik Abdullah, "Adat and Islam: An examination of conflict in Minangkabau", *Indonesia*, Volume 2 (October 1966), p. 1-24.
- Taufik Abdullah, "Some Notes on the Kaba Tjindua Mato: an Example of Minangkabau Traditional Literature", *Indonesia*, Volume 9 (April 1970), p. 1-22.
- Tsuyoshi Kato, "Change and continuity in the Minangkabau matrilineal system". *Indonesia* Volume 25 (April 1978), p. 1-16.
- William Marsden, *History of Sumatera*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Wisran Hadi, *Empan Lakon Perang Padri*, Bandung: Angkasa, 2003, khususnya bag. 4, "Penyeberangan Syekh Abduljalil Tuanku Sembahyang".
- Sri Bektı Yulitasari, Pengaruh Eropa Terhadap Gaya Berpakaian Bumiputra di Yogyakarta (1900-1942). Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2015.
- Zariah Lee, "Muslim Dress Fashion Transformation In Malay Peninsula, 1930-1940". *Jurnal Perspektif*, Jil. 6 Bil. 3. 2014. p. 68-80.